

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai “Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi” maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
2. Aturan pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah sesuai dengan pedoman penggunaan barang milik Negara/daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016.
3. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi berupa sewa dan pinjam pakai. Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Barang milik daerah yang dipinjam pakai berupa kendaraan roda empat kepada instansi vertikal dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan yang dilakukan untuk membantu kelancaran tugas instansi vertikal yang berdampak terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintah Kota Bukittinggi.

5.2 Saran

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Bukittinggi hendaknya membuat kebijakan daerah tentang pemanfaatan barang milik daerah. Kebijakan daerah dibuat tetap berpedoman kepada permendagri nomor 19 tahun 2016 dan didasarkan pada unsur-unsur pengelolaan barang milik daerah yang ada di Kota Bukittinggi. Kemudian, kebijakan daerah perlu di sosialisasikan pada semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah, mulai dari lingkup sekretariat daerah, SKPD, UPTD, kecamatan, puskesmas, kelurahan hingga sekolah negeri yang ada di Kota Bukittinggi.
2. Peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai pelaksana inventarisasi barang milik daerah perlu diupayakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan atau bimbingan teknis. Dengan adanya kegiatan semacam ini diharapkan kualitas pengelola barang milik daerah akan meningkat dan hal ini akan berdampak terhadap kualitas dari hasil inventarisasi dan pemanfaatan barang milik daerah.